

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah merupakan suatu manifestasi yang diraih oleh masyarakat tersebut yang diperoleh dari berbagai upaya, termasuk upaya dan kegiatan aktifitas ekonomi masyarakat tersebut. Untuk mencapai kondisi ideal ini diperlukan perencanaan dan aktivitas selain oleh masyarakat tersebut peran pemerintah sangat dominan, baik menyangkut perencanaan, kegiatan dan bantuan biaya berupa permodalan.

Papua adalah salah satu provinsi terbesar dan terkaya di Indonesia, tidak sedikit sumber daya alam yang dihasilkan daerah ini, mulai dari minyak, batu bara, emas, tembaga, uranium sampai hasil laut bahkan pariwisatanya. Namun dari semua hasil sumber daya alamnya tidak satupun yang mampu merubah kehidupan sosial dan mengangkat strata orang asli Papua, ¹tercatat saat itu Papua masuk dalam daftar salah satu daerah miskin berdasarkan pulau yang berada di Indonesia, berbagai masalah yang dihadapkan oleh masyarakat Papua, mulai dari konflik horizontal sampai konflik vertikal yang menimbulkan banyak gejolak yang terjadi di Papua saat ini. Pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan yang dimana bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penanggung jawab penuh atas masyarakatnya tidak bisa menjalankan tugasnya, dalam hal ini pemerintah

¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795632/bps-kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur> diakses pada tanggal 1 Februari 2019, Pukul 18.00 WIT

lebih condong mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat umum. Pada era pembangunan Jawa sentris dimana pembangunan hanya berpusat pada daerah Jawa saja, banyak masalah yang terjadi di Papua. Pendekatan secara militer pun dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjawab permasalahan yang ada di Papua pada saat itu tetapi bukannya jalan keluar yang didapatkan melainkan timbulnya masalah baru yaitu terjadinya gejolak besar di Papua. Akibat dari hal tersebut maka banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer (TNI-POLRI), tidak hanya itu munculnya gerakan separatis saat ini dilatar belakangi oleh keadaan Papua saat itu yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Papua. Pola pikir yang dianggap terbelakang dan tingkat pendidikan yang sangat rendah belum lagi banyak generasi muda yang putus sekolah hal ini mengakibatkan Papua mengalami kemunduran dan bukan salah satu daerah yang berkembang, hal ini dikarenakan berbagai masalah-masalah diatas, keadaan birokrasi yang tidak stabil dalam pemerintahan yang memicu tidak adanya perkembangan di Papua, tingginya angka Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi.

Kemajuan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di Provinsi Papua sulit berkembang dan optimal dengan kebijakan ekspansi militer serta konsep pembangunan sentralistik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Peningkatan pembangunan dalam berbagai sektor di Irian Jaya menjadi agenda utama pada masa pemerintahan di zaman reformasi, yang kemudian menjadi dasar munculnya dua kebijakan, antara lain;

1. Pemekaran Provinsi Irian Jaya melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong; dan
2. Pemberian Otonomi Khusus kepada Papua melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pemberian Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut dengan Otsus, yang diberikan kepada Papua sebagai salah satu konsep dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua terlegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut dengan UU Otsus Papua.

Mengapa kepada provinsi Papua harus di berikan status otonomi khusus, berdasarkan undang – undang No. 21 Tahun 2001. Undang – undang ini tidak lahir begitu saja. Otsus lahir sebagai suatu produk sejarah melewati suatu proses sejarah yang panjang dalam konteks dinamika sosial – politik dan keamanan dari negara kebangsaan (Nation state) Indonesia. Ia lahir dalam konteks penegakan hukum, HAM dan demokrasi. Undang – undang ini lahir sebagai upaya penyelesaian konflik. Sebagai jalan keluar untuk menciptakan win – win situation antara rakyat Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI (NKRI) dan pemerintah RI yang tetap kokoh teguh mempertahankan integritas dan kedaulatan atas NKRI, di satu pihak sangat jelas bahwa keinginan banyak orang

Papua adalah kemerdekaan penuh dari Republik Indonesia, sebagaimana di sampaikan dalam kongres Papua II di Jayapura (29 Mei sampai 30 Juni 2000). Undang – undang tentang otonomi khusus juga sekaligus membuka ruang bagi perbaikan untuk masa depan yang lebih baik, serta membuka ruang untuk perbaikan dalam rangka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, persamaan hak, dan untuk membuka mengembangkan jati diri, harga diri, serta harkat dan martabat sebagai manusia. Undang – undang ini juga membuka ruang untuk membangun kembali kepercayaan rakyat Papua yang kurang percaya, diakibatkan oleh kekecewaan mereka sangat dalam kepada pemerintah RI, dan sebaliknya membangun kembali kepercayaan pemerintah RI kepada rakyat Papua.

Otonomi khusus Papua sejatinya ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah kesenjangan antara daerah Papua dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu undang - undang otonomi khusus merupakan bentuk kepedulian dan simpati pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua khususnya penduduk asli Papua ras Melanesia. Dengan prinsip itu UU otonomi khusus memperluas ruang gerak partisipasi masyarakat asli Papua dalam segala bidang pembangunan.

² Didalam bidang pendidikan mayoritas masyarakat adat Papua tidak mendapatkan atau mengecap tingkat pendidikan yang rendah. Angka buta huruf perempuan Papua adalah 44% dibandingkan dengan 78% di seluruh Indonesia, dan untuk laki-laki Papua adalah 58% dibandingkan 90% di seluruh negeri.³ Pada bidang kesehatan lebih dari 50% anak-anak Papua di bawah usia lima tahun

² www.bps.go.id/profile/irja.html. Diakses 11 November 2013

³ UNDIP, *Human Development Report*, 2002.

menderita kekurangan gizi, Contohnya pada tahun 2019 terdapat 218 kasus gizi buruk di wilayah Kota Jayapura yang menjadi ibu kota Provinsi Papua.⁴ Keadaan Provinsi Papua dan Papua Barat menyulitkan implementasi atas Otsus yang diberikan, sehingga muncul kebijakan dari Pemerintah Pusat pada bulan September 2011 dengan membentuk badan baru bernama Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat atau selanjutnya disebut dengan UP4B dibawah arahan Wakil Presiden dan dipimpin Jenderal Purnawirawan Bambang Darmono. UP4B hadir sebagai salah satu badan yang berfokus pada pembangunan atas amanah UU Otsus, sehingga menguatkan pembangunan yang efektif dan efisien.

Hingga sekarang sudah lebih 15 tahun status otonomi khusus Provinsi di Papua berjalan. Mulai pada tahun 2014 pemerintah memperkuat pembangunan dengan sistem Indonesia Sentris yaitu pembangunan tidak hanya berpusat pada daerah Jawa saja (seperti gambaran umum diatas) tetapi melainkan pembangunan secara merata ke pelosok-pelosok Indonesia seperti daerah timur khususnya Papua.

Terdapat empat poin di dalam penguatan Indonesia sentris salah satu dari empat poin tersebut adalah Pembangunan Papua, yang meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Hidup rakyat Papua
- b. Pembangunan Infrastruktur Papua
- c. Meningkatkan Produktivitas Papua

Berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah menjadi penanda penting komitmen Pemerintah untuk terus memacu daya saing dan produktivitas. Secara khusus, pemerintah memberikan perhatian bagi daerah-daerah tertinggal

⁴ HIV/AIDS Membayangi Peluang Otonomi Khusus Papua, dalam *Kompas*, 1 November 2004.

melalui pendekatan pembangunan wilayah. Berbagai program yang dilakukan disana diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Tetapi masih banyak yang harus dilakukan pemerintah dan membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua ⁵karena sampai sekarang Papua masih menjadi salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya tetapi belum tercapainya tingkat kesehatan yang baik, Sehingga disini peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana Persepsi masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam bidang kesehatan Kota Jayapura.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkenaan dalam pelaksanaan Otonomi khusus?
2. Apa hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan Otonomi khusus pada bidang kesehatan tahun 2019?

⁵ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795632/bps-kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur>

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi masyarakat kota Jayapura terhadap pelayanan kesehatan berkenaan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan apa saja hambatan selama keberlangsungan otonomi khusus kota Jayapura terutama pada bidang kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan otonomi khusus pada bidang kesehatan sebagai tujuan dari Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sehingga bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dari program Otonomi khusus sendiri. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang lebih baru mengenai penyelenggaraan Otonomi khusus sebagai tujuan dari Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Jayapura terutama pada bidang kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan bahan masuk bagi pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua khususnya di Kota Jayapura. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan evaluasi dalam proses pelaksanaan otonomi

khusus, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Jayapura pada bidang kesehatan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Persepsi masyarakat

Sarlito W. Sarwono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan.⁶ Terdapat juga pengertian bahwa persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenainya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasinya, dan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut.⁷

Persepsi seseorang bersifat tidak tetap, dalam arti lain persepsi dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan keadaan pribadi maupun lingkungan sekitar. Hal ini dapat dipengaruhi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu: ⁸

⁶ Sarlito W Sarwono , *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 24.

⁷ Saprinah Sadli, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Program Pascasarjana, Universitas Indonesia (1976)

⁸ Sarlito W Sarwono, *Op.cit.*, hlm 103.

- a) Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b) Set atau kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c) Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian, kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- d) Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e) Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Robbin mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (*the target*).⁹ Menurut Slamet Santoso melalui teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar. Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang mengkaji tentang kapan

⁹ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm 37.

dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan “mengapa” atau prinsip menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa efeknya. Atribusi kausal pada intinya yaitu menjelaskan antara sebab akibat terhadap dua peristiwa.¹⁰

Sedangkan menurut Kelley menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat suatu efek partikular dan penyebab partikular beriringan dalam situasi yang berbeda-beda, misalnya ketika memandang di masyarakat yang terdapat beberapa orang dengan keyakinannya menjalankan semua nilai adat istiadat, sebagian masyarakat akan beranggapan apakah orang tersebut menjalankan nilai adat istiadat karena ingin mewarisi budaya dari leluhur, apakah karena lingkungan dimana mereka tinggal ataukah juga karena orang tersebut hanya ikut-ikutan.¹¹

Proses Terjadinya Persepsi

Bimo Walgito mendefinisikan persepsi sebagai proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera yang digunakan untuk menerima

¹⁰ Slamet Santoso, *Psikologi Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 254.

¹¹ Taylor, Shelley, E. dkk (terjemahan Tri Wibowo), *Psikologi Sosial*, PT. Kencana, Jakarta, 2009, hlm, 59.

stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Stimulus yang diindera itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. Adapun aspek-aspek dari persepsi yaitu:¹²

- a. Kognisi, berhubungan dengan ingatan, bahasa, asosiasi, konsep, atensi, kesadaran, *problem solving* dan interpretasi stimulus dari objek sehingga membentuk proses berpikir.
- b. Afeksi, berhubungan dengan perasaan dan emosi individu. Pemahaman yang didapat dari proses kognitif akan dapat memahami apa yang individu rasakan yang menyangkut perasaan senang atau tidak senang, sedih atau bahagia.

1.5.2 Otonomi Khusus

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Daerah yang diberikan Otonomi Khusus salah satunya adalah Provinsi Papua dimana arti otonomi khusus menurut UU no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dalam bab I perihal ketentuan umum pasal 1 membatasi arti otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan

¹² Bimo Walgito, *Psikologi Umum*, Andi Offsets, Yogyakarta, 2003, hlm 87.

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak – hak dasar masyarakat Papua. Undang-undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara filosofis UU Otonomi khusus ini dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia serta juga sebagai langkah proteksi bagi hak-hak dasar orang asli Papua yang sejak berintegrasi dengan NKRI hak-hak dasar mereka terabaikan dan termarginalkan. Singkatnya kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.

Undang-undang Otonomi Khusus Papua merupakan sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara filosofis UU Otonomi khusus ini dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia serta juga sebagai langkah proteksi bagi hak-hak dasar orang asli Papua yang sejak berintegrasi dengan NKRI hak-hak dasar mereka terabaikan dan termarginalkan. Singkatnya kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.

Dalam bab IV tentang kewenangan daerah, pasal 4 disebutkan batas-batas kewenangan yaitu:“Kewenangan provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan , moneter, dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan

tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Jadi otonomi khusus artinya pengakuan dan pemberian kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali lima urusan yang disebutkan diatas. Jadi keseluruhan urusan pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah, sedangkan lima hal lain yang masih ada di tangan pemerintah pusat.

Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, Hal – hal mendasar yang menjadi isi undang – undang ini adalah :1) Mengatur kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah propinsi papua serta menerapkan kewenangan tersebut di propinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan 2) Pengakuan dan penghormatan hak – hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. 3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan, pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat. 4) pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif,

dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undang-undang ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

1.5.3 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam Suud (2006:5) adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Lebih lanjut menurut

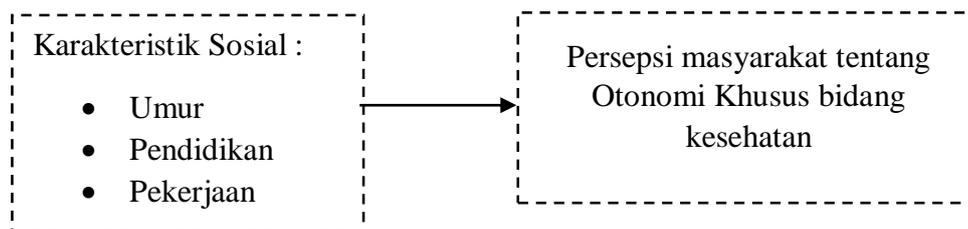
Midgley dalam Suud (2006:5) menjelaskan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan sejahtera secara sosial yang tersusun dari tiga unsur yaitu adalah pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan terakhir, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah *standard living*, *wellbeing*, *welfare*, dan *quality of life*. Brudeseth (2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan bermasyarakat, (c) kesejahteraan emosi, (d) keamanan. Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan permintaan terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam

pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

1.6 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai Persepsi Masyarakat dalam pelaksanaan otonomi khusus bidang kesehatan Kota Jayapura dan melakukan pengelompokan persepsi tersebut berdasar karakteristik sosial masyarakat menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin.



1.7 Definisi Konsep

1. Persepsi masyarakat dalam penelitian ini adalah kesan dan penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus bidang kesehatan Kota Jayapura berdasarkan informasi, data dan pengalamannya dalam hal melihat dan menghadapi dampak dari pelaksanaan Otonomi Khusus
2. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat Kota Jayapura agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai.

3. Otonomi Khusus adalah Suatu kewenangan yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pada Daerah tersebut.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk pelaksanaan bagaimana cara pengukur variabel. Definisi operasionalisasi ini merujuk pada fakta empiris mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Berbagai konsep penelitian tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator atau fenomena penelitian yaitu sebagai berikut:

Di dalam penelitian ini indikator persepsi masyarakat berupa:

1. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh responden. Dalam penelitian ini pengetahuan responden yang diteliti meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Papua.
 - b. Pengetahuan terhadap pelaksanaan Otonomi khusus dalam bidang kesehatan di provinsi Papua.
2. Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami atau dirasakan baik yang telah lama terjadi atau baru saja terjadi. Dalam penelitian ini, pengalaman responden tentang pelaksanaan Otonomi khusus dalam bidang kesehatan yaitu tanggapan responden yang pernah mendapatkan atau menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di kota Jayapura

3. Evaluasi adalah suatu proses pembelajaran untuk menentukan penilaian terhadap suatu hal. Dalam hal ini berarti penilaian responden terhadap pelaksanaan Otonomi khusus dalam bidang kesehatan Kota Jayapura yang meliputi:
4. Harapan adalah kepercayaan tentang sesuatu yang diinginkan untuk bisa didapatkan di waktu yang akan datang. Dalam penelitian ini berarti keinginan yang diharapkan responden terhadap pelaksanaan Otonomi khusus demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan di Kota Jayapura.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif-deskriptif dengan penelitian survei, yaitu dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi/variabel yang timbul didalam masyarakat yang menjadi objek penelitian ini.

1.9.2 Populasi dan sampel

1.9.2.1 Populasi

Dalam penelitian populasi merupakan hal yang penting untuk memberikan batasan yang sangat jelas tentang obyek yang akan diteliti. Menurut Burhan Bungin populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, segala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data

penelitian. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Jayapura.

1.9.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu populasi. Bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya. Sampel diambil karena jumlah populasi yang terlalu besar sehingga sangat sulit jika peneliti mempelajarinya semua. Hal ini tentu saja terbatas pada tenaga, waktu dan biaya penelitian yang dikeluarkan.

Tabel 1.1
Jumlah populasi di wilayah Kota Jayapura

Distrik	Kampung	Kelurahan	Jumlah Penduduk
Jayapura Utara	-	Angkasapura	5.094
		Trikora	6.047
		Mandala	5.485
		Tanjung Ria	15.048
		Imbi	11.441
		Bhayangkara	13.968
	KayoBatu		356
Jayapura Selatan	-	Numbay	9.559
		Argapura	8.290
		Hamadi	21.918
		Ardipura	18.974
		Entrop	18.373
	Tobati		214
	Tahima Soroma		618
Abepura		Asano	8.758
		Yobe	8.327
		Awiyo	13.952
		Kota Baru	9.251
	Enggros		452
	Nafri		1.561
	Koya Koso		3.106
		Vim	15.818
		Abe Pantai	3.045
		Wai Mhorock	10.835
		Wahno	9.485
Heram		Yoka	2.327
	Kampung Waena		1.955
		Hedam	12.452
		Waena	17.906
		Yabansai	11.993
Muara Tami	Holtekamp		1.146
		Koya Barat	5.114
		Koya Timur	3.843

Distrik	Kampung	Kelurahan	Jumlah Penduduk
	Skou Sae		663
	Skou Yambe		662
	Skou Mabo		675
	Koya Tengah		435
	Kampung Mosso		507
Jumlah			299.775

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jayapura

Dalam Penelitian ini pengambilan sampel menggunakan rumus dari Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel minimal

N : Jumlah Populasi

e : error margin, 0,10

Jika diaplikasikan maka

$$n = \frac{299.775}{1 + 299.775(0,10)^2}$$

$$n = \frac{299.775}{2.998,75}$$

$$n = \frac{299.775}{2.998,75}$$

n = 99,9(dibulatkan menjadi 100)

Dari perhitungan sampel dengan rumus Slovin diperoleh 99,9 oleh karena itu dalam penelitian ini jumlah responden adalah 100 orang.

Berdasarkan rumus diatas maka banyaknya sampel yang dibutuhkan sebagai berikut:

1.	Angkasapura	: $5.094/299.775 \times 100$ orang	= 2
2.	Trikora	: $6.047/299.775 \times 100$ orang	= 2
3.	Mandala	: $5.485/299.775 \times 100$ orang	= 2
4.	Tanjung Ria	: $15.048/299.775 \times 100$ orang	= 5
5.	Imbi	: $11.441/299.775 \times 100$ orang	= 4
6.	Bhayangkara	: $13.968/299.775 \times 100$ orang	= 5
7.	Gurabesi	: $18.122/299.775 \times 100$ orang	= 6
8.	Kayo Batu	: $356/299.775 \times 100$ orang	= 0
9.	Numbay	: $9.559/299.775 \times 100$ orang	= 3
10.	Argapura	: $8,290/299.775 \times 100$ orang	= 3
11.	Hamadi	: $21.918/299.775 \times 100$ orang	= 7
12.	Ardipura	: $18.974/299.775 \times 100$ orang	= 6
13.	Entrop	: $18.373/299.775 \times 100$ orang	= 6
14.	Tobati	: $214/299.775 \times 100$ orang	= 0
15.	Tahima	: $618/299.775 \times 100$ orang	= 0
16.	Asano	: $8.758/299.775 \times 100$ orang	= 3
17.	Yobe	: $8.327/299.775 \times 100$ orang	= 3
18.	Enggros	: $452/299.775 \times 100$ orang	= 0
19.	Nafri	: $1.561/299.775 \times 100$ orang	= 1
20.	Awiyo	: $13.952/299.775 \times 100$ orang	= 5
21.	Yoka	: $2.327/299.775 \times 100$ orang	= 1
22.	Kampung Waena	: $1.955/299.775 \times 100$ orang	= 1
23.	Hedam	: $12.452/299.775 \times 100$ orang	= 4
24.	Waena	: $17.906/299.775 \times 100$ orang	= 6

25.	Yabansai	: $11.993/299.775 \times 100$ orang	= 4
26.	Koya Koso	: $3.106/299.775 \times 100$ orang	= 1
27.	Abe pantai	: $3.045/299.775 \times 100$ orang	= 1
28.	Kota Baru	: $9.251/299.775 \times 100$ orang	= 3
29.	Vim	: $15.818/299.775 \times 100$ orang	= 5
30.	Wai Mhorock	: $10.835/299.775 \times 100$ orang	= 4
31.	Wahno	: $9.485/299.775 \times 100$ orang	= 3
32.	Koya Barat	: $5.114/299.775 \times 100$ orang	= 2
33.	Holtekamp	: $1.146/299.775 \times 100$ orang	= 0
34.	Skow Yambe	: $662/299.775 \times 100$ orang	= 0
35.	Koya Timur	: $3.843/299.775 \times 100$ orang	= 1
36.	Skow Mabo	: $675/299.775 \times 100$ orang	= 0
37.	Skow Sae	: $663/299.775 \times 100$ orang	= 0
38.	Koya Tengah	: $435/299.775 \times 100$ orang	= 0
39.	Kampung Mosso	: $507/299.775 \times 100$ orang	= 0

99 Sampel

1.9.3 Teknik pengambilan Sampel

Untuk mendapatkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang representative dari populasi

Ada beberapa teknik sampling:

1. Teknik sampling probabilitas atau random sampling dimana teknik ini dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel yang representatif
2. Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditetapkan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar

Berdasarkan teknik sampling diatas maka peneliti dalam mengambil sampel menggunakan teknik sampling probabilitas jenis stratified proportional random sampling, teknik pengambilan sampel itu digunakan pada populasi yang heterogen dan berstrata dengan mengambil sampel dari tiap-tiap sub populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing sub populasi secara acak dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif dengan melihat jumlah populasi yang ada.

1.9.4 Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data dikelompokkan menjadi empat yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio dan dalam penelitian kuantitatif ini akan menggunakan skala penelitian ordinal yaitu tidak hanya mengkategorikan variabel kedalam kelompok, tetapi juga melakukan peringkat terhadap kategori.

1.9.5 Sumber Data

Dalam suatu proses pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun data atau sumber penulisan penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang berupa:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari dokumentasi dan pembagian kuesioner untuk memperoleh fakta dari pihak pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen maupun literatur yang dianggap terkait dengan judul penelitian seperti buku, jurnal, tesis maupun disertasi, dokumen, artikel.

1.9.6 Skala pengukuran

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan 5 kategori.

1.9.7 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, ada dua teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan guna menghimpun data. Teknik pengumpulan data tersebut adalah:

1. Kuesioner

Teknik pengumpulan data ini dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158)

3. Studi Kepustakaan

Peneliti mencari berbagai literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti akan mencari buku-buku, jurnal, media cetak serta referensi-referensi lain yang terkait dengan penelitian ini sehingga data menjadi lebih lengkap

1.9.8 Instrumen Penelitian

Alat pengumpul data meliputi kuesioner (tertutup, semi tertutup), pedoman wawancara, panduan observasi dan alat pengumpul data lainnya. Dalam penelitian ini akan menggunakan alat kuesioner tertutup. Item Kuesioner tertutup perlu diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya.

1.9.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif. Mengacu pada penggunaan skala Likert dalam skala pengukurannya, maka analisis dapat dilakukan melalui tahapan pembuatan tabel kontingensi, untuk mengetahui besarnya jumlah frekuensi jawaban dari masyarakat yang hanya meminta satu jawaban. Kemudian analisis data dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu Program Statistical Packages For Social Science (SPSS).

1.9.10 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2007:49 dalam Natasya C.M 2018:32). Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variable yang diukur memang benar benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan dengan nilai r tabel untuk degree of freedom ($df = n - k$) dengan alpha 0,05 . Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabelnya dan nilai r positif, maka suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut.

1.9.11 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam (Umar, 2003:113 dalam Natasya C.M 2018:33). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,5 dalam (Ghozali, 2007:46 dalam Natasya C.M 2018:33). Jika Cronbach mendekati 1 maka jawaban responden akan cenderung sama meskipun sama meskipun diberikan kepada orang lain dan bentuk pertanyaan yang berbeda pula.